

BAB VI

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Berdasar permendagri Nomor 113 Tahun 2015, keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan kalurahan. Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJMKal akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran kalurahan diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran kalurahan, yang akan berlaku selama lima tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan kalurahan dalam rangkamencapai visi, misi, dan program pembangunan kalurahan.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan kalurahan dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan kalurahan yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah kalurahan menjadi lebih efisien,

efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya. Dalam rangka meningkatkan kemandirian kalurahan, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar kalurahan yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian kalurahan. Pendapatan Kalurahan Margokaton meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan.

Pengelolaan pendapatan asli kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan kalurahan dalam menggali pendanaan otonomi kalurahan sebagai wujud tanggungjawab daerah. Belanja Kalurahan, meliputi semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajibankalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan.

Pembiayaan kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kalurahan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan kalurahan dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan kalurahan adalah Lurah, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan kalurahan yang diangkat dari perangkat kalurahan yang ditunjuk. Kondisi kemampuan atau kapasitas

keuangan Pemerintah Kalurahan Margokaton sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kalurahan Margokaton. Jumlah pendapatan Kalurahan Margokaton tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.628.968.867; belanja kalurahan Rp 3.739.224.384,89; dengan silpa tahun Sebelumnya adalah Sebesar Rp 282.564.406,97;. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan kalurahan untuk membiayai pembangunan masih diperlukan peningkatan, mengingat saat ini masih banyak yang perlu dilakukan pembenahan baik di bidang infrastruktur maupun yang lainnya.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN

1. Kondisi Pendapatan Kalurahan

Pendapatan kalurahan meliputi semua penerimaan yang merupakan hak kalurahan dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan kalurahan, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan kalurahan meliputi pendapatan asli kalurahan (PAK), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Selama 6 (enam) tahun terakhir pendapatan Kalurahan Margokaton selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2016 Rp 2.310.192.091; tahun 2017 Rp 2.718.789.891; tahun 2018 Rp 2.155.565.891; tahun 2019 Rp 3.896.322.579; tahun 2020 Rp 3.766.367.912; dan tahun 2021 Rp 4.054.113.964.

Dalam hal APBKal terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBKal), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBKal mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBKal), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih

perhitungan anggaran pada tahun lalu.

2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

Kondisi selengkapnya pendapatan Kalurahan Margokaton tahun 2016 s/d tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

N O	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapat an Asli Kaluraha n	181.125.00 0	210.000.00 0	135.000.00 0	133.000.00 0	149.000.00 0	133.731.50 0
2	Pendapat an Transfer	2.088.367.0 91	2.383.789.8 91	2.680.565.8 91	3.293.601.0 49	3.609.432.0 49	3.915.382.4 64
3	Pendapat an Lain- lain	40.700.000	125.000.00 0	340.000.00 0	469.721.53 0	7.935.863	5.000.000
JUMLAH		2.310.192.0 91	2.718.789.8 91	3.155.565.8 91	3.896.322.5 79	3.766.367.9 12	4.054.113.9 64

Tabel 5.1

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kalurahan Margokaton Tahun 2016 s/d Tahun 2021

Berdasarkan dari data tabel diatas jumlah persentase pendapatan Kalurahan Margokaton selama 6 (enam) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2016 PAKal sebesar 7,84%, Pendapatan transfer sebesar 90,4%, dan pendapatan lain-lain sebesar 1,77 %;
2. Tahun 2017 PAKal sebesar 7,72%, Pendapatan transfer sebesar 87,7%, dan pendapatan lain-lain sebesar 1,77%
3. Tahun 2018 PADes sebesar 3,41%, Pendapatan transfer sebesar 84,95 %, dan pendapatan lain-lain sebesar 10,77 %
4. Tahun 2019 PAKal sebesar 3,41%, Pendapatan transfer sebesar 84,5%, dan pendapatan lain-lain sebesar 12,06 %
5. Tahun 2020 PAKal sebesar 3,96%, Pendapatan transfer sebesar 95,83%, dan pendapatan lain-lain sebesar 0,21%
6. Tahun 2021 PAKal sebesar 3,30%, Pendapatan transfer sebesar 96,58%, dan pendapatan lain-lain sebesar 0,12%

2. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan asli Kalurahan Margokaton sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas kalurahan dan hasil dari BUMDes. Untuk tanah kas kalurahan yang pada umumnya berupa lahan plasma dimana hasilnya fluktuatif seiring terjadinya perubahan musim. Begitu juga hasil dari BUMDes dimana hasilnya disesuaikan dengan keuntungan bersih setiap tahunnya. Berdasarkan pada realisasi pendapatan kalurahan selama 5 tahun terakhir, maka pendapatan Kalurahan Margokaton pada tahun 2022 s/d 2027 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

NO	URAIAN	TAHUN					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Pendapatan Asli Kalurahan	131.731.500	137.731.500	204.351.500	209.531.400	212.431.500	220.312.500
2	Pendapatan Transfer	3.011.529.500	3.011.529.500	9.156.583.725	9.554.969.060	3.609.432.049	3.915.382.464
3	Pendapatan Lain-lain	3.500.000	3.500.000	3.450.000	469.721.530	7.935.863	5.000.000
JUMLAH		3.146.761.000	3.152.761.000	9.364.385.225	10.234.221.990	3.829.799.412	4.140.694.964

Tabel 5.2 Proyeksi Pendapatan Pemerintah Kalurahan Margokaton Tahun 2022 s/d 2027

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan kalurahan diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAK dan penerimaan kalurahan lainnya. Pendapatan asli Kalurahan Margokaton tahun 2022 s/d 2027 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5 % per tahun. Proyeksi pendapatan kalurahan ini termasuk Pendapatan Asli Kalurahan bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Kebijakan pengembangan pendapatan kalurahan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022 - 2027) diarahkan pada :

1. Optimalisasi Pengembangan usaha BUMDes Katon Margo Sembada dengan prinsip nondiskriminasi dan

melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan didukung perbaikan manajemen dan tata kelola BUMKAL berbasis profesionalisme SDM.

2. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset kalurahan yang potensial, pengurusan ijin pemanfaatan aset di kawasan strategis cepat tumbuh dengan mengedepankan aturan yang ada dan sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
3. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan transfer.
4. Mengembangkan potensi kewilayahan dengan inovatif membuka usaha-usaha kerakyatan yang memberikan peningkatan pendapatan seperti halnya beternak, bertani dan pengembangan Badan Usaha milik kalurahan.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA KALURAHAN

1. Kondisi Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum kalurahan yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban kalurahan dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan. Belanja kalurahan dirinci menurut urusan pemerintahan kalurahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kalurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja kalurahan harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini

dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran kalurahan. Belanja kalurahan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu belanja kalurahan harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan kalurahan.

2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Kalurahan terdiri atas kelompok : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja bidang Pembangunan Kalurahan, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, Belanja bidang Belanja Tak Terduga.

Dalam 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2022 s.d 2027) estimasi pengelolaan belanja kalurahan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1.759.191.660	1.759.191.660	1.759.191.660	1.759.191.660	1.759.191.660	1.759.191.660
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	870.754.000	916.000.000	925.000.000	980.000.000	985.000.000	990.000.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	90.237.880	90.237.880	90.237.880	150.000.000	200.000.000	250.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	161.500.000	250.000.000	255.000.000	260.000.000	300.000.000	350.000.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	544.000.000	544.000.000	544.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
JUMLAH		3.425.683.540	3.559.429.540	3.573.429.540	3.349.191.660	3.444.191.660	3.549.191.660

Tabel 5.3.
Proyeksi Belanja Kalurahan Margokaton 2022-2027

Formulasi kebijakan belanja kalurahan diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Kalurahan Margokaton, dimana pada level kebijakan anggaran belanja kalurahan dicerminkan pada proyeksi belanja kalurahan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan belanja kalurahan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

1. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan kalurahan, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) Pamong Kalurahan dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
3. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan kalurahan sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
4. Peningkatan akses informasi tentang belanja kalurahan oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
5. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja kalurahan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan kalurahan dan prioritas kebutuhan kalurahan serta pertimbangan kinerja.
6. Mengembangkan usaha dengan penyertaan modal kepada BUMDes sebagai upaya penambahan pendapatan asli kalurahan.
7. Peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan agar dapat

melayani kebutuhan masyarakat dengan tepat dan cepat.

8. Pengembangan system informasi kalurahan dalam pemenuhan pemanfaatan teknologi modern.

C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KALURAHAN

1. Kondisi Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan kalurahan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan kalurahan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan kalurahan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2. Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan kalurahan diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBKal. Struktur pembiayaan kalurahan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan kalurahan yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran kalurahan yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.